IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SDN GADING 1 KOTA SURABAYA

Hendy Bing Putra

S-1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: Hendyputra@mhs.unesa.ac.id

Tjijik Rahaju, S.Sos., M.Si.

S-1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: Tjijikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implmentasi MBS di SDN Gading 1 Kota Surabaya. Pada penelitian tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya merupakan pendekatan deskriptif kualitatif, Fokus penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya yang selanjutnya secara rinci akan dilihat dari subfokus-subfokus menurut George C. Edward(III) sebagai berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Manajemen Berbasis Sekolah sendiri merupakan suatu bentuk otonomi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan atau sekolah yang berdasarkan pada prinsip Kemandirian, Keadilan, Keterbukaan, Kemitraan, Partisipatif, Efisiensi, dan Akuntabilitas. Selain itu, dalam mengelola sekolah diperlukan tata kelola dokumen yang tertib dan sistematis serta kepemimpinan yang efektif. Ditinjau dari komponennya, manajemen sekolah meliputi manajemen kurikulum dsan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan sarana dan prsarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Manajemen Berbasis Sekolah

Abstract

Education is a very important human need because education has the duty to prepare human resources for the development of the nation and state. The progress of science and technology (science and technology) resulted in changes and growth towards a more complex. This raises social problems and new demands that cannot be predicted beforehand, so education always faces problems because of the gap between the expected and the results that can be achieved from the education process. School-based management itself is a form of autonomy in the management of education to educational units or schools based on the principles of independence, justice, openness, partnership, participation, efficiency, and accountability. In addition, managing the school requires an orderly and systematic document management and effective leadership. In terms of its components, school management includes curriculum management and learning, students, educators and education staff, financing facilities and infrastructure, school and community relations, and the culture and environment of the school. . Pada penelitian tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya merupakan pendekatan deskriptif kualitatif, Fokus penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya yang selanjutnya secara rinci akan dilihat dari subfokus-subfokus menurut George C. Edward(III) sebagai berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Keywords: *Public Policy, School Based Management*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk

menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masalah-masalah

sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan.

Pendidikan menuntut adanya perhatian dan partisipasi dari semua pihak. Dengan adanya pendidikan akan dapat mencerdaskan siswa serta membentuk manusia seutuhnya yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pembangunan Pendidikan seharusnya diutamakan karena suatu kemajuan bangsa dapat dilihat dari kemajuan pendidikan. Oleh karena itu komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan seperti siswa, guru, proses belajar-mengajar, manajemen, layanan pendidikan serta sarana penunjan

g lainnya harus terkoordinasi dan bekerjasama dengan baik.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sendiri merupakan suatu bentuk otonomi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan atau sekolah yang berdasarkan pada prinsip Kemandirian, Keadilan, Keterbukaan, Kemitraan, Partisipatif, Efisiensi, dan Akuntabilitas. Dalam MBS, strategi Pembelajaran yang digunakan adalah berpusat pada peserta didik (PAKEM), berbasis TI, dan membentuk karakter. Selain itu, dalam mengelola sekolah diperlukan tata kelola dokumen yang tertib dan sistematis serta kepemimpinan yang efektif. Ditinjau dari komponennya, manajemen sekolah meliputi manajemen kurikulum dsan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah.

Keberlanjutan progam MBS di Indonesia juga amanat kebijakan pemerintah, antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 51 Ayat (1) dinyatakan bahwa : “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah...”. Penggunaan Kurikulum 2013 sebagai salah satu muatan MBS diamanatkan dalam pasal 38 Ayat (2) bahwa: “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervise Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi Untuk pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasiskan keunggulan local”. Pentingnya partisipasi masyarakat diamanatkan dalam pasal 9 bahwa: “Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya.

Disamping itu pentingnya keberlanjutan progam MBS dilandasi amanat Peraturan Pemerintah No 19

Tahun 2005 dan peraturan Pemerintah lainnya yang relevan; serta beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Landasan penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah yang diterapkan

oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pada pasal 68 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pengelolaan Satuan Pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah”. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut maka sekolah-sekolah di Kota Surabaya menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.

Untuk mengetahui gambaran lengkap pelaksanaan tersebut, peneliti menilai bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik mengambil judul “ IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SDN GADING 1 KOTA SURABAYA”. Untuk menganalisis implementasi manajemen berbasis sekolah di SDN Gading 1 teori yang dijadikan rujukan adalah teori implemetasi menurut Subagyo dalam George Edward III (Agustino 2012:149.) dan (Nillam Martha Sonia Ningrum, Afriva Khaidir, Zikri 2018) dalam teori ini didasari oleh beberapa indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi

METODE PENELITIAN

Pada penelitian tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif yang melibatkan narasumber untuk diperoleh informasinya. Untuk itu, data-data yang sudah diperoleh akan di deskripsikan sesuai keadaan atau fenomena yang terjadi pada saat itu juga. Dalam melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, perlu menentukan fokus atau inti yang perlu diteliti.

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, maka yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dan sederhana. Analisis data dilakukan untuk memahami apa yang terjadi dalam data itu, meringkasnya menjadi kesatuan yang sesuai dan mudah dipahami, serta menemukan suatu pola umum yang timbul dari data tersebut. Teknik analisis data yang diperlukan adalah analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif, dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka perlu adanya pembahasan terkait implementasi program desa melangkah di SDN Gading 1 Kota Surabaya untuk menghasilkan output sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah desa. Berikut adalah aspek implementasi kebijakan program desa melangkah yang harus dicapai desa demi mewujudkan tujuan dari program

desa melangkah. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh George C. Edward(III) yang meliputi empat indikator yaitu indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut dalam pembahasan :

1. Indikator Komunikasi

Faktor pertama adalah komunikasi. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya komunikasi, suatu kegiatan atau kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Komunikasi dikatakan berjalan lancar apabila terdapat kesamaan persepsi atau pemikiran terhadap suatu hal yang sedang dikomunikasikan. Terdapat beberapa elemen penting dalam komunikasi, antara lain transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Maksud dari faktor transmisi ialah sebelum pejabat mengambil sesuatu keputusan, maka pengambil keputusan tersebut harus mengetahui apa yang hendak dilakukannya. . Penyaluran informasi (transmisi) yang telah dilakukan oleh SDN Gading 1 terkait Majemen Berbasis Sekolah yang dilakukan melalui media sosial seperti *Whatszpp* dan *Website* dan melalui media cetak seperti brosur-brosur yang ditempelkan di mading serta melalui penyaluran informasi secara lisan kepada masyarakat khususnya wali murid melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh sekolah. MBS di SDN Gading Surabaya juga tidak luput dari hambatan dalam penerapannya. Seperti sekolah yang masih belum mempunyai konten tambahan jadi informasi yang didapat masyarakat masih terbatas.

Selanjutnya adalah faktor kejelasan. jika kebijakan – kebijakan di implementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi harus jelas. Ketidakjelasan proses komunikasi yang disampaikan akan menyebabkan interpretasi yang salah bahkan mungkin dengan makna pesan awal. Dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dasar di Surabaya khususnya SDN Gading 1 pastinya berpedoman kepada Buku Panduan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pesan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemkot Surabaya dalam sosialisasi kebijakan maupun dalam proses evaluasi MBS menjelaskan apa yang sudah ada pada buku panduan. Salah satunya adalah dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada di Kota Surabaya.

Konsistensi Maksudnya adalah, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung dengan efektif maka perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Apabila perintah yang disampaikan berubah – ubah maka dapat dipastikan bahwa pelaksana kebijakan akan merasa kebingungan. Konsistensi sangat perlu dalam proses komunikasi suatu kebijakan MBS misalnya, kebijakan ini tergolong sudah lama di Indonesia terutama di Surabaya. Dalam menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah, pelaksana mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan

oleh yang sampai saat belum pernah ada perubahan terkait SOP tersebut. Namun terdapat perubahan dibidang pengelolaan kurikulum dimana ketika buku panduan ini dikeluarkan masih menggunakan kurikulum KTSP namun sekarang menggunakan kurikulum 2013 sehingga harus ada penyesuaian.

2. Sumberdaya

Faktor sumber daya merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu implementasi kebijakan. Sebaik apapun penyampaian implementor kepada kelompok sasaran, jika tidak ditunjang dengan sumber daya yang memadai maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Dalam hal ini sumber daya manusia (staff) yang ada dalam pelaksanaan MBS di SDN Gading 1 sekolah tidak membentuk tim khusus karena lebih ingin mengoptimalkan kinerja dari pegawai dalam struktur birokrasinya.

Selanjutnya dalam bidang anggaran dalam pelaksanaan MBS SDN Gading 1 menerima anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berbentuk BOS dan BOPDA penggunaan sumber dana tersebut antara lain untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah.

Selanjutnya yang menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjalankan suatu kebijakan agar sesuai dengan prosedur adalah perihal wewenang yang diberikan kepada sekolah diberikan kebebasan untuk merencanakan konsep MBS pada sekolah namun masih terdapat batasan dalam sumber daya keuangan . Dalam pelaksanaannya, Pemkot tetap melakukan pengawasan dan terus berkoordinasi dengan sekolah dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Hal terakhir yang mendukung variabel sumber daya selain memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Terkait hal fasilitas yang menunjang pelaksanaan MBS meliputi, Komputer, proyektor, ruang guru, ruang kelas.

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau pelaksana kebijakan memiliki peran yang penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan. Kejujuran mengarahkan pelaksana kebijakan untuk tetap pada rencana yang sudah dibuat. Komitmen yang tinggi akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugasnya. Pada penelitian ini berfokus pada sikap yang diberikan pegawai SDN Gading 1 kepada masyarakat khususnya wali murid yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh pimpinan dan menuangkannya dalam sikap yang diberikan untuk masyarakat dengan sebaik-baiknya

dalam menghadapi masyarakat agar tercapainya sebuah kepuasan masyarakat. Sikap yang diberikan oleh Pegawai SDN Gading 1 Surabaya dalam menanggapi dan menangani keluhan dari masyarakat sudah cukup baik dengan memberikan penjelasan atau pengertian secara terbuka kepada masyarakat pada saat ada keluhan baik itu melalui pelayanan langsung atau melalui media sosial..

Kemudian mengenai pengaturan birokrasi terkait proses penunjukan atau pengangkatan Pegawai dalam membantu menyukseskan tujuan kebijakan yang diinginkan atau yang sudah ditetapkan. Dalam hal penunjukan atau pengangkatan pegawai sekolah tidak dapat merekrut sendiri sehingga sekolah hanya menerima pegawai dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai insentif yang diberikan kepada Pegawai SDN Gading 1 yang mana insentif merupakan merupakan satu teknik yang perlu dilakukan dalam suatu organisasi untuk memotivasi pegawainya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan. Dalam pelaksanaannya tidak ada pemberian insentif khusus pada Pegawai seperti uang atau tunjangan namun ada insentif berupa penghargaan guru terbaik jika murid mereka diterima di SMP Negeri.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebij akan. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standar Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah fragmentasi, struktur birokrasi yang terfragmentasi akan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Agar struktur birokrasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya penyusunan dan koordinasi mengenai kegiatan struktur organisasi dan tugas masing – masing agar kegiatan dapat tertata dengan baik.

Adapun SOP pelaksana pada program MBS dalam Buku Panduan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah yang dikeluarkan Oleh Kementrian. Dalam pelaksanaannya sekolah sebagai implemetor melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dalam pengelolaan kurikulum dimana sesuai buku panduan tersebut menggunakan kurikulum KTSP namun sekarang menggunakan kurikulum 2013.

Selanjutnya mengenai adanya pembagian tugas dalam menunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Pembagian tugas tersebut dimaksudkan agar beban tugas yang dijalankan seimbang dan kebijakan akan berjalan dengan lancar. Pembagian tugas dalam pelaksanaan MBS di SDN Gading 1 sekolah membuat struktur organisasi dengan membuat lima koordinator seperti koordinator bidang kurikulum, bidang keuangan, bidang humas, bidang sarana dan prasarana, bidang

umum. kelima koordinator tadi bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing mereka

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, analisis Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya menggunakan teori George Edward III yang terdapat empat faktor yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan. Secara umum, SDN Gading 1 Surabaya telah melaksanakan kebijakan MBS dengan cukup baik apabila dilihat dari fasilitas – fasilitas pendukung yang cukup lengkap.

Pada kriteria komunikasi, dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada dimensi transmisi, Pemkot Surabaya melakukan sosialisasi kebijakan MBS kepada seluruh sekolah dasar di Surabaya khususnya SDN Gading 1 Surabaya. MBS di SDN Gading 1 juga tidak luput dari hambatan dalam penerapannya. Seperti sekolah yang belum memiliki konten khusus dalam sosialisasi kepada masyarakat khususnya wali murid . Pada dimensi kejelasan, SDN Gading 1 Surabaya masih berpedoman kepada Buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan. Hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah terkait kebijakan MBS. Kemudian pada dimensi konsistensi, dalam menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah, Pelaksana mengacu pada buku panduan yang sampai saat ini belum ada perubahan namun kenyataan dilapangan terdapat perbedaan dalam manajemen kurikulum dimana di lapangan menerapkan Kurikulum 2013 sedangkan dalam buku panduan masih menerapkan kurikulum KTSP.

Kriteria selanjutnya adalah Sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, Anggaran, fasilitas, serta Informasi dan kewenangan. Dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), sekolah tidak memiliki tim khusus dalam pelaksanaan MBS karena lebih mengoptimalkan kinerja dari pegawai dalam struktur organisasinya. Selanjutnya jika dilihat dari anggaran, Kebijakan MBS di Surabaya memiliki anggaran yang berasal dari APBN berbentuk BOS sedangkan dari pemerintah daerah berasal dari APBD berbentuk BOPDA. Selain itu, anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan perpustakaan , kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa dan perawatan sekolah.. Selanjutnya dilihat dari fasilitas, SDN Gading 1 memiliki komputer, proyektor, ruang guru yang digunakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan ruang kelas yang digunakan untuk pembelajaran dan fingerprint.

Selanjutnya adalah informasi dan kewenangan, Pemkot memberikan kewenangan kepada SDN Gading 1 Surabaya berupa kebebasan adalah hal perencanaan konsep MBS tetapi tetap dalam pengawasan Pemkot. Dari pihak SDN Gading 1 Surabaya pun sudah baik dalam menjalankan kewenangan tersebut. Faktor

selanjutnya adalah disposisi, untuk membantu berjalannya penerapan MBS di SDN Gading 1 Surabaya Surabaya. dalam dimensi efek disposisi Sikap yang diberikan oleh Pegawai SDN Gading 1 Surabaya dalam menanggapi dan menangani keluhan dari masyarakat sudah cukup baik dengan memberikan penjelasan atau pengertian secara terbuka kepada masyarakat pada saat ada keluhan baik itu melalui pelayanan langsung atau melalui media sosial. Selajutnya dalam hal penunjukan atau pengangkatan pegawai sekolah tidak dapat merekrut sendiri sehingga sekolah hanya menerima pegawai dari Dinas Pendidikan,. Dalam hal peningkatan kinerja pegawai sekolah memberikan penghargaan guru terbaik jika murid mereka diterima di SMP Negeri.

Kemudian yang terakhir adalah faktor Struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan MBS ,sekolah memakai SOP dari kementerian pendidikan yang berjudul Buku Panduan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. dalam pelaksanaannya sekolah sebagai implementor melaksanakan sesuai buku panduan namun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan didalam manajemen kurikulum sehingga sekolah harus melakukan penyesuaian. sedangkan dalam Pembagian tugas dalam pelaksanaan MBS di SDN Gading 1 sekolah membuat struktur organisasi dengan membuat lima koordinator seperti koordinator bidang kurikulum, bidang keuangan, bidang humas, bidang sarana dan prasarana, bidang umum. kelima koordinator tadi bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing mereka.

Saran

Sebagai akhir dari penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemkot Surabaya segera menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan MBS yang mengatur tentang MBS di Surabaya agar kebijakan tersebut dapat sesuai dengan karakteristik kota Surabaya.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Surabaya memberikan respon cepat ketika mengajukan perrekrutan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap agar ketika terjadi kekosongan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk penggantinya.
3. Sebaiknya sekolah memperbaharui informasi yang ada di website karena agar uptodate berdasarkan hasil pengamatan peneliti informasi tentang sekolah di website tersebut masih belum diperbaharui.
4. Sebaiknya sekolah meperbaharui sarana dan prasaran karena berdasarkan observasi peneliti masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang tidak berfungsi.sehingga dalam penggunaanya tidak maksimal seperti lab komputer yang banyak terdapat komputer yang tidak dapat digunakan dan membuat lahan parkir untuk siswa sehingga tidak perlu menyewa kepada warga..

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. serta mengucapkan terima kasih kepada Dosen Penguji Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Fakih Imam Winanda 2017. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di Sekolah Menengah Atas AL Kautsar Bandar Lampung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Raden Intan Lampung: .
- Liza Yulisna, Sowiyah, Irawan Suntoro. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Bandar Lampung:
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/056000> 15 Maret 2019
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Moleong, J, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.RemajaRosdakarya.
- Murkam Sudarto, Darmansyah, Sri Warsono. 2012. Manajemen Berbasis Sekolah: Jurnal Ilmiah Manajemen Indonesia. Vol 13, No 3,2013.
- Niken Elvok 2015, Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan Melalui MBS di Sidoarjo (Studi pada pelaksanaan MBS di SMPN 3 Waru, Sidoarjo).: Publica. Vol 3, No. 4, 2015
- Nillam Martha Sonia Ningrum, Afriva Khaidir, Zikri Alhadi. 2018. Implementasi kebijakan rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di ukm/ormawa universitas negeri padang: Jurnal of Public Sector Inovations. Vol 3, No. 1. 2018
- Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta

- Undang-Undang PELAYANAN PUBLIK (UU RI No. 25 Tahun 2009) tahun terbit 2013, diterbitkan oleh Sinar Grafika
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press
- Suharto, Edi. 2007. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna, 2014. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka BagusPress
- Wahab, Solichin A. 2012. Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo